



Pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango

Miftahulzana Hola¹, Juriko Abdussamad², Sri Yulianty Mozin³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia²

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia³

Corresponding Email: miftahola01@gmail.com

Abstract

This study aims to determine, describe, and analyze the management of State Property at the Bappeda Litbang Office of Bone Bolango Regency. The approach used in this research is qualitative. The research method is descriptive qualitative. Data collection was carried out using interview techniques, observation, and documentation studies. Data analysis techniques in this study were carried out by data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The results of the study that in the planning aspect, the preparation of the Regional Property Needs Plan (RKBMD) is carried out annually with procurement based on operational needs. In the implementation and utilisation aspects, some elements of BMN procurement and utilisation have run effectively. In the aspect of supervision, it has involved various internal, external, and community parties. However, there are still several obstacles in BMN management at the Bone Bolango Regency Bappeda Litbang Office, such as data that has not been integrated. Suggestions to optimise the management of State Property at the Bone Bolango Regency Bappeda Litbang Office require technology development to improve data integration through effective information systems, coordination, and transparency.

Keywords: Management, State Property, Bone Bolango

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian bahwa pada aspek perencanaan, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dilakukan setiap tahun dengan pengadaan berdasarkan kebutuhan operasional. Pada aspek pelaksanaan dan pemanfaatan, beberapa elemen pengadaan dan pemanfaatan BMN sudah berjalan efektif. Pada aspek

pengawasan telah melibatkan berbagai pihak internal, eksternal, dan masyarakat. Namun demikian, masih ada beberapa hambatan dalam pengelolaan BMN di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango seperti data yang belum terintegrasi. Saran agar pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango lebih optimal diperlukan pengembangan teknologi untuk peningkatan integrasi data melalui sistem informasi yang efektif, koordinasi, serta transparansi.

Kata Kunci: Pengelolaan, Barang Milik Negara, Bone Bolango

Pendahuluan

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dari administrasi publik yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Ats Tsaurah et al., 2024). Dalam hal ini, BMN mencakup aset negara seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan barang lainnya, yang diatur untuk memberikan manfaat bagi kepentingan umum dan menjaga keberlanjutan operasional pemerintah (Aditia et al., 2024). Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango berperan penting dalam pengelolaan BMN, di mana tugas utamanya adalah merencanakan pembangunan daerah serta mengoordinasikan program pembangunan antar Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi Kantor Bappeda Litbang terdiri dari Kepala Kantor dan Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab untuk mencatat, menginventarisasi, mengamankan, dan memelihara aset BMN. Selain itu, Kantor ini juga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat untuk kebijakan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN di Kantor Bappeda Litbang mengacu pada berbagai regulasi hukum, seperti UU No. 1/2004, PP No. 27/2014, dan Permendagri No. 19/2016, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setempat. Pengelolaan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan aset negara dan mendukung kinerja organisasi. (Yuhani & Dyah Setyaningrum, 2024)

Namun, pengelolaan BMN di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi beberapa masalah, seperti ketidakakuratan data BMN, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dan pengelolaan BMN. Selain itu, pengawasan internal dan pelaksanaan penghapusan aset seringkali tidak sesuai prosedur. Berdasarkan wawancara awal, terdapat juga masalah dalam perencanaan anggaran yang tidak tepat, menyebabkan kerusakan cepat pada aset yang ada. Penelitian ini akan mengkaji pengelolaan BMN di Kantor Bappeda Litbang dengan menggunakan teori prinsip pengelolaan BMN yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), yang berfokus pada perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang efisien. (Mannan et al., 2024)

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Yusanto (2020:11) merupakan salah satu metode untuk melakukan penelitian berdasarkan kajian yang khas dan unik, serta dapat dilakukan oleh peneliti yang memiliki keinginan kuat memberikan

sumbangsih karya nyata dengan pendekatan dan berpikir secara subjektif. Metode penelitian ini adalah kualitatif phenomenology sebagai cara untuk membedah sebuah fenomena yang terjadi dengan teori dalam melakukan elaborasi hasil temuan dengan pembahasan penelitian (Kuswarno dalam Yusanto (2020:9). Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, seperti Laporan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara dalam tiga tahun terakhir, Notulen Rapat terkait pengelolaan Barang Milik Negara, dan dokumen relevan lainnya. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman (dalam Nugrahani, 2014:173) yang memiliki tiga komponen, yaitu: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Usaha peneliti untuk meningkatkan derajat kepercayaan penelitian ini adalah melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Merujuk pada Barlian (2018:73), kriteria keabsahan data untuk menetapkan keabsahan (*trust worthiness*) data menggunakan teknik meningkatkan kepercayaan (*credibility*) untuk memberikan derajat kepercayaan data pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango yang diperoleh peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan yang tepat dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango

Perencanaan yang tepat dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango merujuk pada proses strategis dan sistematis dalam pengelolaan aset pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan BMN secara efisien, akuntabel, dan transparan. proses perencanaan dan pengelolaan aset daerah di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dilakukan setiap tahun, Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango melakukan proses perencanaan untuk menentukan barang atau aset apa saja yang dibutuhkan untuk operasional kantor. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango ada yang dianggarkan dan ada yang tidak dianggarkan karena sesuai kebutuhan kerja. Hambatan utama yang sering dihadapi pada perencanaan kebutuhan dan penganggaran dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango yakni belum sesuai anggaran yang disetujui untuk kebutuhan Bappeda dengan perencanaan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disusun temuan penelitian mengenai aspek perencanaan yang tepat dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango bahwa Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango sudah melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran di setiap tahun melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Pengadaan barang atau aset bergantung pada kebutuhan operasional yang sebenarnya, sehingga bisa dianggarkan atau tidak, sesuai dengan kondisi kerja pada periode tersebut. Beberapa hambatan pada perencanaan yang tepat adalah

ketidaksesuaian antara anggaran yang disetujui dan perencanaan yang telah dibuat, koordinasi yang belum optimal antara bagian perencanaan, keuangan, dan pengelola BMN, keterbatasan informasi seperti spesifikasi barang, serta sistem informasi yang belum terintegrasi.

Kesimpulan temuan penelitian pada sub fokus satu bahwa aspek perencanaan yang tepat dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dilakukan melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di setiap tahun dan pengadaan barang didasarkan pada kebutuhan operasional. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang meliputi ketidaksesuaian antara anggaran yang disetujui dan kebutuhan yang direncanakan, koordinasi yang belum optimal antar bidang/bagian, ketidakakuratan data aset, serta sistem informasi yang belum terintegrasi yang memperburuk akses terhadap data yang dibutuhkan. Temuan penelitian mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) setiap tahun dan pengadaan barang berbasis kebutuhan operasional merupakan langkah yang sistematis dalam perencanaan pengelolaan BMN. Namun, hambatan seperti ketidaksesuaian antara anggaran yang disetujui dan kebutuhan yang direncanakan, koordinasi yang belum optimal antar bidang/bagian, ketidakakuratan data aset, dan sistem informasi yang belum terintegrasi mengganggu efektivitas perencanaan. Untuk mencapai perencanaan yang optimal, diperlukan keselarasan antara perencanaan dan anggaran, koordinasi lintas unit/bidang yang kuat, data aset yang akurat, dan sistem informasi yang terintegrasi. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan aset negara juga sangat penting demi meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan BMN.

Temuan penelitian ini bahwa adanya koordinasi yang belum optimal antar bidang/bagian, Kuswarak, dkk (2022) juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar unit dalam proses perencanaan BMN. Temuan penelitian ini bahwa adanya ketidakakuratan data aset, Indayanti (2024) mengemukakan bahwa perencanaan yang tepat sangat bergantung pada data yang akurat dan lengkap. Ketidakakuratan data aset akan menghambat kemampuan untuk membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat berdampak negatif pada pengelolaan BMN secara keseluruhan. Temuan penelitian ini bahwa sistem informasi yang belum terintegrasi, Mardan & Nasution (2022) menekankan pentingnya teknologi dan sistem informasi yang baik dalam perencanaan pengelolaan BMN. Sistem informasi yang tidak terintegrasi mempersulit pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan tepat waktu, sehingga perencanaan menjadi kurang efektif.

Pelaksanaan/ pemanfaatan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango

Pelaksanaan/pemanfaatan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango merujuk pada bagaimana kantor tersebut menggunakan aset atau BMN dengan optimal, sehingga mendukung operasional dan program kerja secara produktif dan sesuai dengan fungsinya, tanpa pemborosan sumber daya. Efisien berarti memanfaatkan barang dengan biaya minimal dan sumber daya yang tepat, sementara efektif berarti memastikan barang digunakan sesuai tujuan dan memberikan hasil yang maksimal bagi kebutuhan kantor. Tujuannya adalah agar BMN

dikelola dengan baik, terpelihara, dan tidak ada pemborosan atau pengangguran aset. Berikut data penelitian mengenai aspek pelaksanaan/pemanfaatan yang efisien dan efektif yang dilihat dari pengadaan, penggunaan/ pemanfaatan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango dibedakan berdasarkan kategori aset yang dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). KIB A mencatat aset berupa tanah dan bangunan. KIB B mencatat barang-barang bergerak, seperti motor, komputer, dan peralatan kantor lainnya. Aset yang paling banyak tercatat adalah barang-barang di KIB B, seperti kendaraan dan peralatan, yang merupakan jenis aset umum yang sering diadakan di kantor tersebut. Penatausahaan ini memastikan bahwa setiap aset tercatat sesuai dengan kategori KIB yang tepat, sehingga memudahkan pengelolaan dan pemantauan. Namun demikian, masih ada aset yang tidak tercatat dalam inventarisasi, sehingga sulit untuk dilakukan pemantauan dan pengendalian.

Kesimpulan temuan penelitian pada sub fokus dua bahwa aspek pelaksanaan dan pemanfaatan BMN dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango beberapa elemen efisien dan efektif, seperti pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pemanfaatan aset yang sesuai dengan peruntukannya. Namun, terdapat beberapa elemen yang mengindikasikan ketidakefektifan, termasuk adanya aset yang tidak tercatat, pengadaan yang kurang relevan, penghapusan aset yang tidak prosedural, serta keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas pengelolaan.

Temuan penelitian ini bahwa aspek pelaksanaan dan pemanfaatan BMN dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango menunjukkan beberapa elemen sudah berjalan efisien dan efektif, seperti pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pemanfaatan aset yang sesuai dengan peruntukannya. Namun, terdapat beberapa elemen yang mengindikasikan ketidakefektifan, termasuk adanya aset yang tidak tercatat, pengadaan yang kurang relevan, penghapusan aset yang tidak prosedural, serta keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas pengelolaan.

Pengawasan (monitoring) dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango

Pengawasan (monitoring) dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango adalah proses pemantauan dan pengendalian atas penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset milik negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa BMN digunakan sesuai dengan peraturan, tidak disalahgunakan, dan tetap dalam kondisi baik. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan berkala, pencatatan aset, dan evaluasi efektivitas penggunaannya, serta pelaporan atas segala kondisi atau masalah terkait aset. Monitoring ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik negara, serta mencegah penyalahgunaan atau kerugian aset negara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disusun temuan penelitian mengenai aspek pengawasan (monitoring) dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango melibatkan tiga jenis pengawasan utama yakni internal, eksternal, dan masyarakat, serta dihadapkan pada beberapa tantangan yang spesifik.

Kesimpulan temuan penelitian pada sub fokus tiga bahwa aspek pengawasan (monitoring) dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango telah melibatkan beberapa pihak, baik internal, eksternal, maupun masyarakat. Kendala utama meliputi sulitnya mendeteksi masalah kerusakan atau kehilangan aset karena ketidakjujuran pemegang aset dalam melaporkan kondisi sebenarnya, ketergantungan yang tinggi pada dokumen resmi untuk menyelesaikan masalah kehilangan aset, serta laporan pengadaan barang inventaris yang tidak akurat setiap semester.

Hasil penelitian Febriana (2017) menemukan masih banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola BMD seperti penyalahgunaan wewenang dan pemanfaatan BMD untuk kepentingan pribadi. Pengelolaan BMD memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait temuan penelitian ini, hal ini menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar BMD dikelola sesuai dengan aturan. Dalam konteks Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, pengawasan menjadi krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa. Ini relevan bagi Kantor Bappeda Litbang karena partisipasi masyarakat atau pihak-pihak terkait dapat memperkuat proses pengawasan, memastikan bahwa pengelolaan BMD dilakukan secara benar dan sesuai regulasi. Dalam konteks Kantor Bappeda Litbang, monitoring yang baik harus memastikan bahwa segala aktivitas terkait BMD mematuhi regulasi yang ada, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Hasil penelitian Sondakh, dkk (2017) menemukan bahwa pengelolaan barang milik daerah (BMD) merupakan hal yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan BMD di Kota Kotamobagu, yaitu: (1) pengamanan dan pemeliharaan, (2) penilaian, (3) penghapusan, (4) kepatuhan. Terkait temuan penelitian ini, pengawasan yang baik menjadi penting untuk memastikan bahwa data terkait BMN dikelola dengan benar, sehingga laporan keuangan kantor tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Monitoring bertujuan untuk menjaga keandalan informasi keuangan yang didasarkan pada manajemen BMN yang efektif. Oleh karena itu, monitoring yang baik di Kantor Bappeda Litbang Bone Bolango perlu menyoroti aspek-aspek seperti pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan kepatuhan untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN berjalan optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan (monitoring) yang efektif di Kantor Bappeda Litbang sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan BMN dan untuk memastikan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan aset daerah.

Hasil penelitian Setiabudhi (2019) menemukan bahwa peran Barang Milik Daerah adalah untuk menghasilkan keuntungan dan memaksimalkan manfaat sumber daya aset agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai. Terkait temuan penelitian ini, pengawasan atau monitoring menjadi kunci untuk memastikan bahwa BMN dikelola secara efektif agar potensi keuntungan dan manfaat yang bisa diperoleh dari aset-aset tersebut tercapai. Tanpa pengawasan yang baik, aset mungkin tidak digunakan secara optimal, sehingga potensi manfaat dan kontribusinya terhadap kinerja pemerintahan berkurang. Hasil penelitian Toansiba (2023) menemukan bahwa perencanaan kebutuhan BMD belum dilakukan

berdasarkan prinsip Permendagri, sehingga nilai manfaat barang yang diadakan belum memenuhi kebutuhan unit pengguna. Keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala utama yang menyebabkan pengelolaan BMD di Dinas Sosial Papua Barat belum optimal. Terkait temuan penelitian ini, pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa perencanaan pengadaan BMN dilakukan dengan benar dan sesuai prinsip Permendagri. Monitoring yang baik akan memeriksa apakah perencanaan kebutuhan BMN disusun secara akurat, mempertimbangkan kebutuhan riil, dan menghasilkan manfaat maksimal bagi unit pengguna. Pengawasan di Kantor Bappeda Litbang Bone Bolango perlu dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diadakan benar-benar memenuhi kebutuhan operasional kantor, serta dapat dimanfaatkan secara optimal. Monitoring juga dapat membantu mengidentifikasi apakah ada aset yang kurang dimanfaatkan atau tidak sesuai dengan fungsinya. Monitoring berperan dalam memastikan bahwa meskipun ada keterbatasan anggaran atau SDM, pengelolaan BMN tetap dilakukan secara efisien dan sesuai prosedur. Pengawasan dapat membantu dalam memonitor penggunaan anggaran dan efektivitas SDM dalam mengelola BMN. Dalam pengelolaan BMN di Kantor Bappeda Litbang Bone Bolango, pengawasan harus memantau apakah semua proses pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan, sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk Permendagri dan peraturan terkait lainnya.

Kesimpulan

Perencanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango sudah dilaksanakan dengan baik melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tahunan dan pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti ketidaksesuaian antara anggaran yang disetujui dan kebutuhan yang direncanakan, koordinasi antar bidang yang belum optimal, ketidakakuratan data aset, serta sistem informasi yang belum terintegrasi. Dalam pelaksanaan dan pemanfaatan BMN, meskipun beberapa elemen sudah berjalan efisien dan efektif, terdapat masalah seperti aset yang tidak tercatat, pengadaan yang kurang relevan, penghapusan aset yang tidak prosedural, dan keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas pengelolaan. Di sisi lain, pengawasan pengelolaan BMN telah melibatkan berbagai pihak, baik internal, eksternal, maupun masyarakat, namun masih dihadapkan pada kendala seperti sulitnya mendeteksi kerusakan atau kehilangan aset akibat ketidakjujuran pemegang aset, ketergantungan pada dokumen resmi untuk menangani masalah kehilangan aset, serta laporan pengadaan barang yang tidak akurat setiap semester.

Referensi

- Abdussamad, Y. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Kompetensi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*, 6.
- Aditia, D., Nasution, D., Nasution, A. P., & Alpi, M. F. (2024). Pengaruh Penerapan Smart ASN Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara di Era. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (Sensasi) 2019*.

- Ats Tsaurah, Z., Fuad, F., & Rifai, A. (2024). Perolehan Tanah Untuk Perwakilan Negara Asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). *Tunas Agraria*, 7(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.272>
- Barlian, E. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Padang: Sukabina Press.
- Febriana, E. N. (2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lentera Hukum*, 4, 135.
- Indayanti, A. N. (2024). *Pengembangan manajemen strategi pengadaan Barang Milik Negara (BMN) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri: Penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Kuswarak, K., Nuzleha, N., & Zulfikar, I. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Sumber Air Mesuji Sekampung Dilampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 6(1), 45-56.
- Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2024). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.364-383>
- Mardan, J., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 39-44.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Saprudin, S. (2018). Pengaruh Dokumen Perencanaan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango. *Gorontalo Accounting Journal*, 1(2), 44-52.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan aset pemerintah daerah dalam perspektif good governance. *the studies of social sciences*, 1(1), 7-21.
- Sondakh, B. Y., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Toansiba, Y. (2023). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2090-2104.
- Yuhani, O., & Dyah Setyaningrum. (2024). EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DENGAN MENGGUNAKAN MODIFIKASI INDEKS PENGELOLAAN ASET. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(1). <https://doi.org/10.25105/jat.v11i1.18864>